



JPALG Vol. 3 (No.1) (2019): hlm: 18-28

JPALG**Journal of Public Administration and Local Governance**<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini>

Penerapan Model *Smart Village* dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang

Tia Subekti¹, Ratnaningsih Damayanti²Government Science, Universitas Brawijaya, Indonesia^{1,2}

Received: 28 Maret 2019. ; Accepted: 10 April 2019.; Published: 30 April 2019

Abstrak

Kajian tentang pembangunan desa tengah populer dalam diskursus politik dan pemerintahan. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melahirkan adanya kebijakan tentang dana desa dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa. *Trend* inovasi desa saat ini mencoba mengadopsi model *smart village* yang merupakan turunan dari *smart city*. Sebagai sebuah konsep baru, penerapan *smart village* di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak ditemukan gap antara kajian teoritis dengan praktik dalam penerapan *smart village*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba melihat pengembangan *smart village* di Kabupaten Malang dengan titik fokus pada pengembangan ekowisata berbasis *smart village* di Desa Sanankerto Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Harapannya melalui penelitian ini mampu menghasilkan sedikitnya tiga temuan utama. Pertama, sejauh mana upaya penerapan *smart village* diterapkan dalam pengembangan desa wisata berbasis ekowisata. Kedua, peluang dan tantangan penerapan *smart village*. Ketiga, rekomendasi kepada para stakeholder terkait.

Kata Kunci: *Smart Village*; Desa, Desa Wisata; Kabupaten Malang.

© 2019 Public Administration Programme, Universitas Tidar. All rights reserved

* Corresponding author :

Address: Jalan Veteran Kec. Lowokwaru, Kota Malang,

Prop. Jawa Timur 65145

E-mail: tiasubekti@ub.ac.id

P-ISSN: 2614-4433

E-ISSN: 2614-4441

LATAR BELAKANG

Banyaknya jumlah desa di Indonesia merupakan salah satu tantangan dalam upaya pembangunan desa. Data terakhir menunjukkan jumlah desa mencapai 83.981 yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51UPT/SPT (Unit Pemukiman Transmigrasi/Satuan Pemukiman Transmigrasi) (BPS,2018)¹. Untuk mencapai pembangunan desa yang maksimal Kementerian Desa pada tahun 2017 mencanangkan empat program prioritas untuk desa. *Pertama*, produk unggulan kawasan pedesaan. *Kedua*, membangun embung air desa. *Ketiga*, mengembangkan BUMDes. *Keempat*, membangun sarana olahraga desa.²

Sebaliknya, dari bawah desa secara mandiri mulai menunjukkan aktivitas pembangunan. Dana desa dalam beberapa kasus telah berhasil menstimulus meningkatnya upaya pembangunan desa dari bawah. Berdasarkan kajian dari berbagai media menunjukkan beberapa desa di Indonesia telah berhasil mengelola dana desa untuk percepatan pertumbuhan ekonomi mereka. Misalnya dengan mengelola dana desa melalui pembangunan wisata berbasis BUMDes seperti Desa Umbul Ponggok di Klaten. Atau menciptakan ekonomi kreatif

desa dengan pemanfaatan jejaring bisnis seperti Desa Tamansari di Banyuwangi.³

Geliat pembangunan desa melalui program-program desa yang inovatif tersebut pada akhirnya menginisiasi munculnya model pembangunan desa berbasis konsep *smart village*. Konsep ini diadopsi dari konsep *smart city* yang lebih dulu dikenal di Indonesia. Istilah *smart village* mulai dipakai oleh beberapa desa di Indonesia. Misalnya sebutan *smart village* pada Kelurahan Pondok Ranji Tangerang Selatan⁴, atau istilah *smart kampung* yang diterapkan di Banyuwangi. Istilah *smart village* diterjemahkan segai sebutan desa "cerdas". Istilah "*smart*" digunakan dalam rangka melawan stigma desa yang telah lama melekat pada desa. Seperti: desa dianggap tidak berpendidikan, terbelakang, miskin, ketinggalan jaman, dan lain sebagainya. Saat ini desa dianggap mampu melakukan pembangunan masyarakatnya secara cerdas.

Bahasan tentang *smart village* menjadi sebuah kajian yang menarik karena dua hal. *Pertama*, ini merupakan kajian yang baru yang nantinya akan memperkaya kajian-kajian lain tentang desa. Khususnya kajian tentang inovasi desa. *Kedua*, masih banyak ditemukanya *gap* antara kajian teoritis konseptual tentang *smart village* dengan implementasi *smart village* di Indonesia. Dengan melihat pada kasus

¹ <https://www.antaraneews.com/berita/776355/jumlah-desa-tertinggal-berkurang-6518-desa>

² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3962422/4-program-prioritas-percepat-pertumbuhan-ekonomi-desa>

³

<https://www.suara.com/lifestyle/2017/05/15/095022/ini-daftar-10-desa-terbaik-di-indonesia>

⁴ <https://tangerangonline.id/2017/01/26/tangsel-jadi-pelopor-smart-village-di-indonesia/>

penerapan *smart village* pada pengembangan desa wisata Boon Pring Sanankerto pada akhirnya akan terlihat bagaimana pemataan peluang dan tantangan *smart village* di Indonesia khususnya dalam rangka pembangunan desa wisata. Sehingga kajian ini mampu menghasilkan beberapa poin rekomendasi terhadap stakeholder terkait.

Dari *Smart City* menuju *Smart Village*

Smart village merupakan konsep yang diadopsi atau konsep turunan dari *smart city*. Perbedaanya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Jika *smart city* diimpelmentasikan di level kota, maka *smart village* diimpelemnetasikan di level desa. *Smart city* sendiri dimaknai sebagai sebuah kota cerdas. *Smart City* adalah pengembangan konsep, implementasi, dan implementasi teknologi yang diterapkan pada suatu daerah (terutama perkotaan) sebagai interaksi kompleks antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratt, 2014: 94). Pada prinsipnya *smart city* sebenarnya hadir untuk menjawab berbagai tantangan yang terjadi pada lingkungan perkotaan. Seperti misalnya masalah kemacetan, masalah lingkungan kumuh, sanitasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan masalah khas perkotaan lainnya. Sehingga kemudian yang bisa dikatakan sebagai kota cerdas adalah sebuah kota yang memiliki dimensi sebagai berikut : *smart economy, smart people, smart government, smart energy, smat*

mobility, smart environment, smart living. (Pratama, 2014: 96)⁵. Namun dalam beberapa kasus penerapan *smart city* mengalami penyempitan makna sehingga hanya dipahami sebagai sebuah pemanfaatan teknologi informatika pada pembangunan sebuah kota.

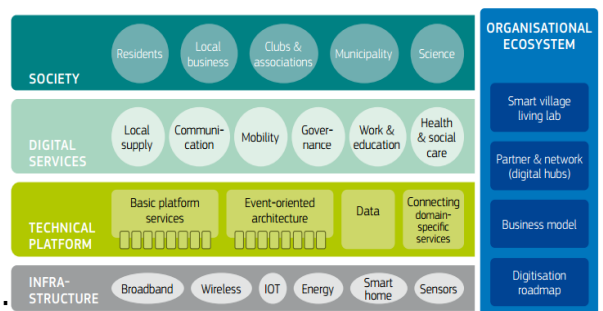
Di Indonesia sendiri sejauh ini belum ada kota yang benar-benar *menerapkan smart city* secara penuh. Penelitian pada tahun 2017 di Kota Malang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap menerapkan *smart city*. *Smart city* di Kota Malang hanya terbatas pada diciptakannya beberapa aplikasi untuk pelayanan publik. Itupun dalam implementasinya tidak berjalan secara maksimal. Sebut saja aplikasi sambat online. Pada kenyatannya tidak secara cepat menyelesaikan keluhan masyarakat.ditambah dengan komponen kota cerdas yang lain yang belum terpenuhi, misalnya *smart living, smart mobility*, dan lain sebagainya (Rahmad Gustomy dan Tia Subekti, 2017).

Mengadopsi dari sistem *smart city* maka *smart village* pada mulanya juga memiliki tujuan yang sama. Yakni memberikan tawaran solusi pada masalah pedesaan, Seperti misalnya masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keterlebelakangan teknologi, kekurangan informasi, dan masalah lainnya khas kawasan

⁵ Ni Putu Nurwita Pratami Wijaya . Analyse of Smart City Concept as Supporting the Government Information Disclosure, Case Study: Bandung Smart City.

rural. Berbagai akademisi mencoba mendefinisikan *smart village*, diantaranya definisi dari European Network for Rural Development: *Smart villages are rural areas and communities which build on their existing strengths and assets as well as new opportunities to develop added value and where traditional and new networks are enhanced by means of digital communications technologies, innovations and the better use of knowledge for the benefit of inhabitants.*⁶ Kata kunci yang muncul dari definisi tersebut adalah tentang asset desa, teknologi, dan jaringan. Dalam tulisan yang dikeluarkan oleh EU network for Rural Development lebih jauh menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah pertanian di lingkungan pedesaan yang smart, bagaimana membuat mobilitas antara kawasan desa dan kota yang smart, atau bagaimana menciptakan sebuah energy yang smart untuk kawasan pedesaan.

Lebih jauh lagi *smat village* diharapkan mampu membuat sebuah ekosistem kawasan pedesaan yang *smart* yang mampu memadukan dengan teknologi. Sehingga muncul istilah digital ekosistem seperti yang terlihat pada gambar berikut



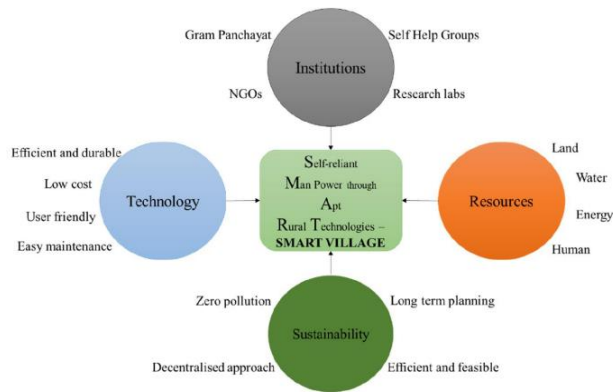
Gambar 1. A Digital Ecosystem

Sumber : *EU Network For Rural Development*
No. 26 tahun 2018

Selanjutnya pada literature yang berbeda dijelaskan bahwa *smart village* didefinisikan sebagai sebuah desa pintar yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud meliputi layanan air bersih, pendidikan dasar, tempat tinggal, komunikasi dan transportasi, lapangan pekerjaan, dan penjualan hasil pertanian.⁷ Berikut dijelaskan pula framework dari *smart village* dengan melihat implementasi *smart village* di salah satu desa di India:

⁶ European Network for Rural Development
no 26 ISSN 1831-532

⁷ ETR 90, Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES, IISc, 2015



Gambar 2: *Smart Village Framework*

Sumber: ETR 90, Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES,IISc, 2015

Literature selanjutnya memberikan definisi *smart village* yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Brian Heap (2015) memberikan penekanan adanya peningkatan kesadaran masyarakat desa akan hak-hak mereka dan menuntut adanya pelibatan masyarakat dalam proses pemerintahan serta tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat. Hak-hak yang dimaksud disini sama dengan penjelasan akademisi lainnya yang meliputi hak-hak dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya.⁸ *Smart village* diharapkan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat desa seperti yang didapatkan oleh masyarakat kota namun dengan tetap

mempertahankan kearifan local. Sehingga tidak tercipta *gap* yang besar antara kehidupan masyarakat kota dan desa. Ini diharapkan juga menjadi bagian solusi dari maraknya arus urbanisasi dari desa ke kota.⁹

Rutujua Somwansi, dkk (2016) memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dari *smart village* yang meliputi : 1. *Smart security*. 2. *Efficient public transportation system*. 3. *Improving sanitation conditions*. 4. *Solid and liquid waste management*. 5. *Rain harvesting /Rain water drainage system*. 6. *Safe drinking water facilities*. 7. *Use of renewable energy Energy conservation*. 9. *Grievance redresser*. 10. *Strengthening CBOs*. 11. *Functional bank account*. 12. *Facilities regarding to the agriculture*. 13. *Latest& affordable medical facilities*. 14. *E-governance*. 15. *Use of modern technologies for improvement of locality*. 16. *Improvement on women empowerment*. 17. *Educational facilities*.¹⁰

Pada penerapannya *smart village* dipahami sebagai konsep yang memiliki banyak makna sesuai dengan kebutuhan dari pemakainya. Tidak ditemukan definisi tunggal dari *smart village*. Di Indonesia misalnya *smart village* di adopsi oleh pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pedesaan di Indonesia yang beranekaragam. Namun

⁸ Essays compiled by Brian Heap, Research Associate of the Centre of Development Studies, University of Cambridge Published in 2015 by Banson, 27 Devonshire Road, Cambridge CB1 2BH ISBN: 978-0-9932932-0-7 (paperback); 978-0-9932932-1-4 (hardback)

⁹ Ibid .,

¹⁰ Rutujama Somwansi, dkk.” Study and Development of Village as a Smart Village”. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 6, June-2016 395 ISSN 2229-5518 IJSER © 2016 <http://www.ijser.org>

mayoritas yang dimaksud dengan *smart village* di Indonesia terbatas pada pemanfaatan teknologi internet dalam pembangunan desa.

Pada akhirnya, penelitian ini fokus pada penerapan *smart village* pada pengembangan desa wisata. Nuryati (1992) dalam (Ade Jafar dan Risna)¹¹ menjelaskan yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana *smart village* digunakan sebagai pijakan atau acuan untuk mengembangkan desa wisata. Tantangannya adalah bagaimana membawa konsep yang modern ini untuk diimplementasikan pada pengembangan desa wisata yang berbasis pada tradisi dan potensi lokal desa. Sehingga muncul banyak *gap* antara kajian teoritis dan implementatif yang pada akhirnya memunculkan analisis pemetaan peluang dan tantangan dari penerapan *smart village* pada pengembangan desa wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 metode utama dalam pengumpulan data. *Pertama*, wawancara. Peneliti melakukan

wawancara dengan narasumber utama yakni pengelola BUMDes secara langsung. *Kedua*, studi pustaka. Pada tahap ini peneliti melakukan kajian pustaka terhadap berbagai literature dan dokumen yang menunjang penelitian dan penulisan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Desa Wisata Boon Pring Sanankerto

Desa Wisata Boon Pring yang terletak di Desa Sanankerto adalah salah satu dari 16 desa wisata yang dicanangkan sebagai *smart village* oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Penerapan *smart village* di desa wisata ini berupa adanya aplikasi berbasis android yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan. Aplikasi tersebut diantaranya menyediakan informasi mengenai harga tiket, fasilitas, sarana dan prasarana, foto atau gambar objek wisata, penjualan dan pemesanan tiket, dan lain-lain¹².

Pembangunan desa wisata di Kabupaten Malang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan BUMDes. Pembangunan desa wisata Boon Pring di Desa Sanankerto Turen Kabupaten Malang didasari oleh adanya potensi desa berupa pohon bambu atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan Pring.

¹¹ Ade Jafar dan Risna Resnawaty dalam Prosiding KS: Riset dan PKM Vol 4 Nomor 1 hal 1-140 ISSN: 2442-4480

¹² <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171024141019-307-250625/kabupaten-malang-usung-konsep-pariwisata-smart-village>

Sementara sebutan "Boon" diambil dari bahasa sansekerta yang artinya adalah anugerah. Sehingga sebutan Boonpring secara keseluruhan diartikan sebagai anugerah pohon bambu. Selanjutnya, desa wisata ini lebih dikenal dengan desa wisata "Boon Pring Andeman" yang mulai dikelola sejak tahun 2017.¹³

Kawasan wisata memiliki luas keseluruhan mencapai 36,8 hektar dengan komoditas utamanya tanaman bambu sebanyak 65 jenis bambu. Diantaranya adalah Bambu Petung, Bambu Petung Hitam, Bambu Apus, Bambu Tutul, Bambu Ampel, Bambu Wulung, Bambu Kuning, Bambu Pagar, Bambu Budha, Bambu Amplex, Bambu Embong, Bambu Angus Tifolis,¹⁴ Desa wisata ini juga dilengkapi dengan adanya waduk kecil yang disebut sebagai waduk Andeman. Pengunjung bisa berkeliling waduk dengan menggunakan perahu atau sepeda air. Fasilitas lain yang diberikan berupa wahana wisata *flying fox*. Secara keseluruhan desa wisata ini menyuguhkan wisata alam berbasis potensi lokal sebagai daya tarik wisatanya sehingga mereka menyebutnya sebagai eko wisata.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMdes Bapak Samsul Arifin menjelaskan bahwa implementasi *smart village* di desa wisata

boonpring tersebut baru sebatas pemanfaatan media untuk promosi wisata. Pengelola wisata memasarkan desa wisata melalui media sosial instagram dan juga melalui pembuatan *website*. Ketika orang ingin berwisata ke boonpring yang dilakukan pertama adalah mengecek melalui mesin pencari google. Dan disitulah informasi tentang desa wisata ini diinfokan. Seperti harga tiket, rute perjalanan, wahana wisata, dan juga foto-foto tentang objek wisata tersebut. Ditambah dengan promosi wisata melalui media sosial instagram dengan memasang foto-foto yang menarik. Pengelola sengaja menyediakan spot foto yang menarik. Harapannya ketika foto tersebut diunggah ke media sosial maka akan menarik minat pengunjung lain. Cara ini efektif digunakan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Saat ini jumlah pengunjung ke wisata Boonpring perharinya mencapai 100-300 orang.¹⁵

Peluang dan Tantangan *Smart Village* dalam Pengembangan Desa Wisata

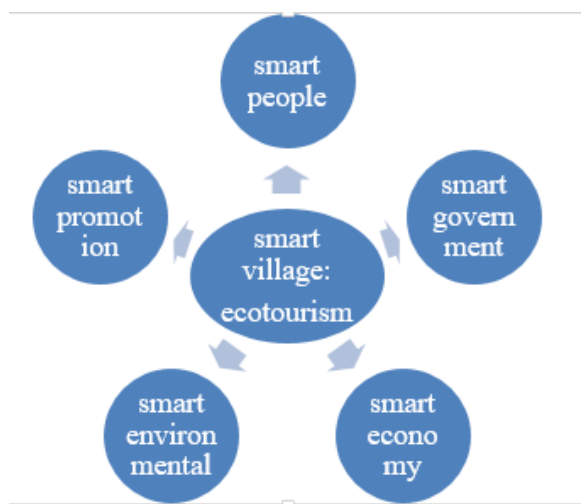
Merujuk pada penerapan *smart village* di desa Sanankerto tersebut masih terlihat adanya *gap* yang masih besar antara kajian teoritis dan implementasi dari *smart village*. Sebagai komparasi bisa dilihat penerapan *smart village* di negara lain misalnya di India atau di negara-negara Eropa yang sudah berhasil mendesign sebuah kawasan pedesaan menjadi desa pintar secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik.

¹³ Wawancara dengan Samsul Arifin Direktur BUMDes Sanankerto pada 17 November 2018

¹⁴ <https://bisniswisata.co.id/malang-kembangkan-wisata-hutan-bambu/>

¹⁵ <https://www.kanalmalang.net/2017/09/boon-pring-andeman-rute-jalan-harga-tiket.html>

Untuk memetakan peluang dan tantangan *smart village* dalam pengelolaan desa wisata penulis meminjam penjelasan *smart village* dari European Network for Rural Development yang pada intinya menjelaskan bahwa yang dimaksud *smart village* adalah desa yang memiliki kemampuan mengelola asset mereka untuk bisa memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan jaringan dan teknologi untuk kepentingan penduduk.¹⁶ Sehingga berangkat dari definisi tersebut dapat dilakukan pemetaan terhadap peluang dan tantangan pengelolaan desa wisata berbasis *smart village* dengan melihat pada Desa Wisata Boon pring sebagai berikut:



Gambar 3: Analisis Peluang dan Tantangan *Smart Village* pada Pengembangan Desa Wisata

Sumber: Penulis, 2019

Pertama, smart people. Yang dimaksud dengan *smart people* disini adalah masyarakat yang cerdas. Dalam pengembangan pariwisata yang terpenting adalah unsur masyarakat yang mampu mendukung jalannya desa wisata. Masyarakat desa wisata Boonpring sudah memiliki modal SDM masyarakat yang cukup. Dikatakan cukup karena masyarakat memiliki basis ketrampilan yang khas yakni ketrampilan mengolah kerajinan bambu. Kelebihan dari pengrajin bambu di desa ini, mereka bisa mengolah semua bagian dari bambu mulai dari akar, batang, hingga daun. Jika umumnya kerajinan bambu hanya dibuat sebagai anyaman. Maka masyarakat desa ini mampu mengolahnya menjadi berbagai kerajinan yang lebih menarik. Masyarakat mampu memberikan nilai tambah pada bambu sehingga menjadi nilai tambah dan daya tarik tersendiri.¹⁷ Selain memiliki ketrampilan, masyarakat desa Sanankerto juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam mendukung pengembangan desa wisata. Mereka aktif membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk mengelola desa wisata.

Kedua, smart government. Merujuk pada pendapat Scholl (2014)¹⁸ yang dimaksud dengan *smart government* adalah pemerintah

¹⁶ Ibid., ETR 90, Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES,IISc, 2015

¹⁷ <https://www.cendananews.com/2018/08/geliat-kerajinan-bambu-di-desa-sanankerto.html>

¹⁸ Gabriela Viale Pereira,dkk.2018. Smart Government in the Context of Smart Cities: A literature Review.

Yang diunduh melalui laman

https://www.researchgate.net/publication/325304603_Smart_governance_in_the_context_of_smart_cities_A_literature_review

yang cerdas, terbuka, dan partisipatif. *Smart government* identik dengan penerapan *e-government*. Yakni pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan pemanfaatan teknologi. Misalnya, pembuatan website pemerintah desa dalam rangka mewujudkan transparansi desa, pelayanan desa berbasis elektronik, pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi dan keterbukaan publik. Menampung aspirasi masyarakat melalui jejaring media sosial, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, meningkatkan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi publik dan mengurangi peluang korupsi. Untuk kebutuhan pengembangan desa wisata pemerintah Desa Sanankerto membentuk BUMDes. Sehingga pengelolaan Desa Wisata sepenuhnya dikelola melalui BUMDes. Harapannya melalui BUMDes dapat dicapai keuntungan yang maksimal dengan pengelolaan yang optimal. Selebihnya, dari hasil penelitian menunjukkan belum ada pengembangan pemerintahan berbasis teknologi yang mampu menunjang terciptanya *smart government* secara efektif dan efisien.

Ketiga, smart economy. Poin penting dalam mewujudkan *smart village* adalah adanya upaya untuk mewujudkan ekonomi yang 'smart'. Beberapa literatur mencoba mendefinisikan *smart economy* sebagai berikut: "*smart economy*" requires new

*qualitative approaches of the concept of economic growth, focused on the quality of life and on the standard of living, incorporating new variables of the development model: basic needs, human capital, human rights, well being, participation in community life, fundamental freedoms of man: political, economic, social, cultural, dignity and respect progress (technological progress, scientific research).*¹⁹

Selanjutnya, literature lain menjelaskan bahwa untuk mewujudkan *smart economy* maka akan merujuk pada beberapa indikator diantaranya yaitu ekonomi yang inovatif, kreatif, kemampuan masyarakat untuk melihat peluang ekonomi, memanfaatkan peluang yang ada pada level lokal namun berorientasi global, adanya pengelolaan ekonomi yang bagus mulai dari manajemen, pemasaran, dan lain sebagainya.²⁰

Smart economy sangat berkaitan dengan unsur yang pertama yaitu smart people. Artinya butuh masyarakat yang cerdas untuk bisa membangun ekonomi yang cerdas. Pada pengelolaan desa wisata Boon Pring Sanankerto terlihat adanya upaya untuk membangun kondisi ekonomi yang *smart* melalui sedikitnya 3 aktivitas. *Pertama*, adanya upaya meningkatkan nilai pada potensi lokal masyarakat yakni pada

¹⁹ Diana Apostol, dkk, Smart Economy Concept-Facts and Perspective yang diunduh melalui laman <http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/wpconf141113.pdf> pada 29 Januari 2019

²⁰ T.M Vinod Kumar (ed). Smart Economy in Smart Cities. Springer Nature Singapore Pte.Ltd.2017. DOI 10.1007/978-981-10-1610-3_1 yang diunduh melalui laman https://www.researchgate.net/publication/306924920_Smart_Economy_in_Smart_Cities pada 29 Januari 2019

kerajinan bamboo. Kerajinan bambu yang dibuat oleh masyarakat Desa Sanankerto tidak hanya menghasilkan anyaman bambu namun sudah mencoba memberi nilai tambah dengan menciptakan hasil karya lain. Seperti hiasan atau souvenir. Menariknya pengrajin bambu di desa ini memanfaatkan semua bagian bambu mulai dari akar, batang hingga daun. Sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan bisa bertambah. *Kedua*, melihat peluang ekonomi dengan menciptakan sebuah destinasi wisata baru. Masyarakat dan pemerintah setempat secara kreatif dan inovatif mampu menyulap sebuah kawasan perkebunan bambu menjadi sebuah destinasi wisata alternatif yang menghasilkan. *Ketiga*, pemanfaatan teknologi. Salah satu unit usaha yang populer dan menghasilkan di desa ini adalah pengrajin tusuk sate dan tusuk sempol (makanan ringan). Masyarakat mulai berganti ke penggunaan mesin dalam memproduksi tusuk sate dan sempol. Sehingga bisa memproduksi dalam jumlah yang besar.

Keempat, Smart environmental. Smart environmental bertujuan untuk mengatasi berbagai problem lingkungan. Problem lingkungan yang dimaksud adalah masalah sanitasi, kebersihan udara, sampah, *global warming*, masalah emisi karbon, ketersediaan ruang public yang ramah anak, ketersediaan taman, dan lain sebagainya. Beberapa daerah menjadikan lingkungan sebagai salah satu poin utama yang digarap untuk bisa

mewujudkan *smart city*. Surabaya dan Probolinggo misalnya gencar dengan pembangunan taman. Kabupaten Malang yang konsen terhadap penciptaan lingkungan yang ramah anak. Sementara di Negara lain . India misalnya konsen terhadap pembangunan energi alternative di level desa. Sementara Hongkong mewujudkan lingkungan yang *smart* dengan cara menciptakan bangunan-bangunan/ gedung yang ramah lingkungan yang disebut sebagai *green and intelegent building*.²¹

Masalah lingkungan di level pedesaan sedikit berbeda dengan masalah di kota. Misalnya desa tidak begitu banyak menghadapi masalah sampah dan polusi udara, namun masalah lingkungan di pedesaan biasanya identik dengan masalah penataan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Seperti Desa Wisata Boonpring yang menghadapi tantangan dalam penataan dan pengelolaan lingkungan untuk bisa menarik wisatawan. Belum banyak yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mewujudkan *smart enviromental*. Yang dilakukan sejauh ini sebatas pada penataan kawasan perkebunan dan waduk menjadi desa wisata.

Desa memiliki peran yang besar dalam menjaga ekosistem yang ada di bumi. Desa berperan besar dalam mengimbangi aktivitas yang menimbulkan pencemaran di daerah

²¹ Hongkong Smart City Blueprint yang diunduh melalui laman [https://www.smartcity.gov.hk/doc/HongKongSmartCityBlueprint\(EN\).pdf](https://www.smartcity.gov.hk/doc/HongKongSmartCityBlueprint(EN).pdf)

perkotaan. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di level desa untuk menopang keseimbangan lingkungan. *Pertama*, menjaga lingkungan dengan mempertahankan kearifan lokal. *Kedua*, membuat energi terbarukan dengan memanfaatkan limbah ternak. *Keempat*, menjaga kelestarian sumber daya alam misal air, hutan, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya.

Kelima, Smart promotion. Dalam upaya pengembangan desa wisata yang penting dilakukan adalah upaya pemasaran. *Smart promotion* dapat dilakukan melalui sebuah *branding* terhadap kawasan wisata yang dipromosikan melalui media sosial. Sejauh ini pengelola desa wisata Boonpring telah cukup berhasil melakukan hal tersebut. Promosi melalui media sosial *instagram*, *facebook*, *website*, dan *blogspot* telah dilakukan. Namun, upaya *branding* terhadap kawasan wisata ini belum dilakukan dengan maksimal. *Branding* dilakukan dengan cara menampilkan sisi kekhasan dari sebuah tempat wisata yang membedakannya dengan desa wisata lain. Ini penting dilakukan mengingat desa wisata serupa telah banyak bermunculan bahkan di lingkungan Kabupaten Malang sendiri. *Destination branding* diyakini memiliki kekuatan untuk merubah cara pandang seseorang terhadap suatu tempat atau

tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari studi kasus yang dipilih dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan model *smart village* pada pengembangan desa wisata tersebut masih belum dilakukan secara maksimal. Baik masyarakat maupun pemerintah belum sepenuhnya siap membangun *smart village*. Ini terlihat dalam minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pemerintah. Serta minimnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terjadi penyempitan makna dalam implementasi *smart village*. *Smart village* hanya identik dengan pemanfaatan media sosial untuk ajang promosi desa. Namun *smart village* tidak hadir secara nyata untuk mengatasi problem yang ada di desa. Belum ada upaya yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan *smart village* di desa tersebut. Sehingga pada bagian ini penulis menyampikan beberapa poin rekomendasi terhadap *stakeholder* terkait sebagai berikut:

- a. Rekomendasi untuk pemerintah desa : dalam rangka mewujudkan *smart government* pemerintah desa perlu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk

²² Abdullah, Fianto, Hidayat, Penciptaan Destination Branding Kawasan Wisata B-29 Kabupaten Lumajang Sebagai Upaya Memperkenalkan Obyek Wisata Baru Vol.4, No.2, Art Nouveau, 2015

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga mampu mendorong dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Kemudian, inisiasi dari pihak pemerintah penting dilakukan untuk mendorong upaya yang serius dalam pembangunan *smart village*. Selain itu pemerintah juga perlu membuka kerjasama dengan pihak luar untuk mendorong pembangunan *smart village*. Misalnya mendorong kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi.

b. Rekomendasi untuk masyarakat: masyarakat harus lebih inovatif, kreatif dan partisipatif sehingga mendorong munculnya inisiasi untuk pengembangan ekonomi yang *smart*. Misalnya dengan terus mengedukasi diri supaya mampu mengelola potensi lokal yang bernilai global.

c. Rekomendasi untuk pihak swasta: sebagai wujud dari tanggungjawab sosial perusahaan maka pihak swasta berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk membangun lingkungan masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan komunikasi dengan pemerintah untuk turut membantu membangun *smart village*.

d. Rekomendasi untuk akademisi: akademisi perlu mengembangkan penelitian terkait dengan *smart village* di Indonesia. Sehingga akan muncul *grand design smart village* yang sesuai dengan kondisi sosial budaya desa-desa di Indonesia.

e. Rekomendasi untuk pemerintah pusat/Kementrian Desa: perlu adanya upaya yang serius untuk membangun sebuah *pilot project smart village* di Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi sehingga mampu menyelesaikan problem yang ada di wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apostol, Diana dkk. (2019) *Smart Economy Concept-Facts and Perspective* from <http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/wpconf141113.pdf>
- Brian Heap. 2015. Smart Village: New Thinking for off-grid communities worldwide. Research Associate of the Centre of Development Studies University of Cambridge from https://www.researchgate.net/publication/280737024_Smart_Villages_pdf_link_e4svorgn-ew-thinking
- European Network for Rural Development no 26 ISSN 1831-532
- Fianto,, Abdullah, Hidayat. "Penciptaan Destination Branding Kawasan Wisata B-29 Kabupaten Lumajang Sebagai Upaya Memperkenalkan Obyek Wisata Baru". *Art Nouveau* Vol.4, No.2 2015
- Hongkong Smart City Blueprint.(2017). from [https://www.smartcity.gov.hk/doc/HongKongSmartCityBlueprint\(EN\).pdf](https://www.smartcity.gov.hk/doc/HongKongSmartCityBlueprint(EN).pdf)
- Jafar, Ade dan Risna Resnawaty dalam *Prociding KS: Riset dan PKM* Vol 4 Nomor 1 hal 1-140 ISSN: 2442-4480
- Kumar ,T.M Vinod (ed).(2017). *Smart Economy in Smart Cities*.Springer Nature Singapore Pte.Ltd. DOI 10.1007/978-981-10-1610-3_1 from <https://www.researchgate.net/publicatio>

[n/306924920 Smart Economy in Smart Cities pada 29 Januari 2019](#)

Somwansi, Rujutama, dkk. (2016). "Study and Development of Village as a Smart Village". International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 6, June-2016 395 ISSN 2229-5518 IJSER © from <http://www.ijsr.org>

T.V, Ramachandra, dkk. (2015). Smart Ragihalli: Efforts towards Self-Reliant & Self Sufficient system empowering Man Power (rural youth) with Appropriate rural technologies. ETR 90. Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES,IISc. From https://www.researchgate.net/publication/318034841_SMART_VILLAGE_FRAMEWORK

Viale Pereira, Gabriela dkk. (2018). *Smart Government in the Context of Smart Cities: A literature Review*.

Wijaya , Ni Putu Nurwita Pratami Analyse of Smart City Concept as Supporting the Government Information Disclosure, Case Study: Bandung Smart City.

<https://www.antaranews.com/berita/776355/jumlah-desa-tertinggal-berkurang-6518-desa>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3962422/4-program-prioritas-percepat-pertumbuhan-ekonomi-desa>

<https://www.suara.com/lifestyle/2017/05/15/095022/ini-daftar-10-desa-terbaik-di-indonesia>

<https://tangerangonline.id/2017/01/26/tangsel-jadi-pelopor-smart-village-di-indonesia/>

<https://bisniswisata.co.id/malang-kembangkan-wisata-hutan-bambu/>

<https://www.kanalmalang.net/2017/09/boon-pring-andaman-rute-jalan-harga-tiket.html>

<https://www.cendananews.com/2018/08/geliat-kerajinan-bambu-di-desa-sanankerto.html>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171024141019-307-250625/kabupaten-malang-usung-konsep-pariwisata-smart-village>

Wawancara dengan Samsul Arifin Direktur BUMDes Sanankerto pada 17 November 2018